BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan akhirnya penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekening Kas Negara adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas negara melalui Kantor Pos dan Giro Bendaharawan Umum di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung II. Seksi Giro Pos wajib membuka rekening kas negara dan menutup rekening kas negara dengan berita acara penutupan serta melakukan pembukuan guna mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas negara. Pemindahan saldo rekening kas negara wajib dilakukan dan apabila mengalami keterlambatan akan dikenakan denda bunga sebesar 3 % dari jumlah saldo yang belum dipindahkan. Kantor Pos dan Giro akan diberikan imbalan jasa perbendaharaan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Dalam mengelola rekening kas negara diperlukan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai alat transaksi penerimaan dan pembayaran rekening kas negara. Untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) ini Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara harus terlebih dahulu mengeluarkan Surat Kuasa Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

5.2 Saran-saran

Untuk meningkatkan kwalitas laporan Pengolahan Data Rekening Kas Negara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) pada Bendaharawan Umum di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Bandung II, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pemberian denda bagi para pegawai yang tidak disiplin terutama dalam hal jam kerja, sehingga pada saat penerimaan dan pengeluaran rekening kas negara dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan Seksi Giro Pos tidak lagi dikenakan denda bunga yang dikarenakan keterlambatan pemindahan saldo rekening kas negara.
2. Seksi Giro Pos pada Bendaharawan Umum diharuskan teliti dalam hal pengolahan Surat Perintah Membayar (SPM), karena Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikirimkan bila tidak sesuai dan tidak akurat dengan data yang ada maka departemen lain akan mengalami kesulitan dalam pengolahannya dan hal ini pulalah akan merusak citra para pegawai Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI